

Studi Persepsi Terhadap Strategi dan Model Perguruan Tinggi Kalimantan Tengah dalam Meraih Indikator Kinerja Utama

Jhon Retei Alfri Sandi¹⁾, M. Doddy Syahirul Alam²⁾, Katriani Puspita Ayu³⁾

1. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP – Universitas Palangka Raya
2. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP – Universitas Palangka Raya
3. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP – Universitas Palangka Raya
Email: doddyfisip@gmail.com

ABSTRAK

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka memberikan harapan bagi perguruan tinggi untuk berkreasi dan berinovasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan menyelaraskan lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berupa strategi dan model terhadap pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif guna menggali data primer dan data sekunder sebanyak-banyaknya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Tengah memiliki kesiapan yang berbeda-beda dalam menjalankan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kendala keuangan untuk kebutuhan berkreasi dan berinovasi seringkali menjadi hambatan utama. Hal tersebut tidak terlepas dari minimnya dunia usaha dan dunia industry di Kalimantan Tengah. Dengan demikian dibutuhkan strategi dan model implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang lebih fleksibel dan akomodatif sesuai dengan postur keuangan masing-masing perguruan tinggi.

Kata-kata kunci: strategi; model; perguruan tinggi; kalimantan tengah

PENDAHULUAN

Dampak pandemi sudah mendisrupsi cara pembelajaran pendidikan tinggi di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghasilkan Surat Edaran pada tanggal 9 Maret 2020 mengenai pembelajaran dengan cara daring serta bertugas dari Rumah dalam rangka penangkalan penyebaran COVID-19. Seluruh kampus di Indonesia mau tidak mau menghasilkan peraturan mitigasi akibat wabah ini. (Dirjen Dikti, 2020) Senada dengan (Karakose, 2021) yang berpendapat bahwa setelah pandemi Covid-19, komunitas pendidikan global menyadari bahwa adopsi langsung dari teknik pengajaran jarak jauh darurat online diperlukan dan tidak dapat dihindari.

Program Kampus Merdeka yang menekankan pada 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama meliputi: 1) Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, 2) Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, 3) Dosen berkegiatan di luar kampus, 4) Praktisi mengajar di dalam kampus, 5) Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan mendapat rekognisi internasional, 6) Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, 7) Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, 8) Program studi berstandar internasional, semua indikator itu mutu atau kualitas terhadap kurikulum, dosen dan pengajar, dan lulusan perguruan tinggi.

Gambar 1.1 Transformasi Pendidikan Tinggi



Sumber: (Dirjen Dikti, 2021)

Tahun 2022 merupakan tahun kedua Kampus Merdeka dijalankan, namun demikian proses internalisasi dan sosialisasi kepadakalangan perguruan tinggi masih terus dijalankan. Hal ini tidak terlepas daritanangan dan hambatan yang disebabkan oleh kondisi internal perguruan tinggi yang seringkali menjadi alasan pimpinan perguruan tinggi untuk tidak segera melaksanakan program tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa akademisi (Uswatiyah, Argaeni, Masrurah, Suherman, & Berlian, 2021; Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfah, 2019) tantangan tersebut diantaranya adalah: 1) karena belum meratanya mutu pembelajaran, kenyataan daya saing bangsa serta inovasi nasional, dan mutu jasa serta perlindungan hukum untuk mahasiswa, 2) penguatan kompetensi kebangsaan mahasiswa, butuh penguatan pendidikan kewarganegaraan pada program kampus merdeka, secara menyeluruh, untuk menciptakan mahasiswa yang beradab serta sanggup diharapkan oleh negeri, 3) perubahan manajemen kurikulum dan sistem penilaian pendidikan tinggi.

Menurut pandangan kami hal ini sangat penting dilakukan agar pemerintah mendapat laporan terkini secara nyata perkembangan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Sehingga tantangan dan hambatan di tingkat daerah akan dapat teridentifikasi dengan baik sekaligus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat rekomendasi berupa rumusan strategi dan model yang tepat untuk diterapkan di Kalimantan Tengah dalam menjaga mutu pendidikan tinggi.

Berdasarkan uraian problem empiris dan problem teoritis tersebut diatas, tim peneliti mengusulkan judul penelitian: **Strategi dan Model Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah Dalam Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi Ditinjau Dari Indikator Kinerja Utama.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan tujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan

pada latarbelakang masalah. Segerasetelah penelitian lapangan mulai mengumpulkan data, kesulitan akan muncul. Yang signifikan muncul dari keragaman sumber dan format data. Potongan informasi tertentu berasal dari pengamatan terstruktur atau tidak terstruktur. Mayoritas informasi berasal dari wawancara. Selain itu, ada dokumen rutin atau unik, catatan sejarah, dan artefak nyata. Studi tertentu dapat menggabungkan data dari kuesioner dan survei, serta film dan catatan statistik. (Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, 2014)

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan mengambil beberapa situs yakni perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang saat ini telah mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Penelitian berfokus beberapa poin yang relevan dengan rumusan masalah yakni:

- a. Persepsi para stakeholder terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- b. Kekuatan dan kelemahan masing-masing perguruan tinggi.
- c. Peluang dan ancaman masing-masing perguruan tinggi.
- d. Strategi dan model yang diterapkan masing-masing perguruan tinggi
- e. Rekomendasi model yang dapat disepakati sebagai standarmaksimum dan standar minimum.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berupa strategi pengembangan mutu perguruan tinggi berbasis kinerja utama. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pengembangan FISIP Universitas Palangkaraya dalam memperbaiki mutu pendidikan di atas fakultas maupun jurusan/prodi. Pengembangan strategi yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari dua tahapan, yaitu analisis kebutuhan dan pengembangan strategi untuk perbaikan mutu pendidikan dimasa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui strategi pengembangan mutu FISIP UPR saat ini sekaligus standar mutu yang diinginkan FISIP sesuai dengan arahan kementerian yang tertuang didalam 8 IKU yang diformulasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahapan analisis kebutuhan tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan desain pengembangan mutu.

Persepsi Para Stakeholder Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Menurut Rita Rahmaniati (Ketua LP3MPT UMPR): Pihak UMP telah melaksanakan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) sejak tahun 2020. Program MBKM yang dilaksanakan berkolaborasi dengan Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Menurut Dekan FISIP UMP seperti di kutip dari media kalteng.antaranew.com yang terbit pada 17 Januari 2021, telah tiga program studi yang melaksanakan program MBKM sejak semester ganjil 2020/2021. Program ini dinilai memberikan mahasiswa kesempatan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru, melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Selain mengirimkan mahasiswa, FISIP UMP juga telah melaksanakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan cara mengirimkan dosen ke FISIPOL Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sejak semester ganjil 2020/2021.

Menurut Erman P. Ranan (Ketua LP3MPT UNKRIP): Universitas Kristen Palangkaraya belum secara optimal melaksanakan program MBKM. Namun perencanaan terhadap pelaksanaan program tersebut telah dilakukan salah satu nya dengan penandatanganan Kerjasama antara 4 Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik (FISIP) di Kalimantan Tengah yaitu

FISIP UPR, FISIP UMP, FISIP UNKRIP dan FISIP PGRI. Kesepakatan untuk bekerjasama tersebut membuka kesempatan untuk melakukan pertukaran dosen maupun mahasiswa antar FISIP pada keempat perguruan tinggi tersebut. Program pertukaran dosen untuk mengajar juga telah terealisasi antara dosen FISIP UNKRIP dengan FISIP UPR.

Menurut Sri Mujiarti Ulfah (Sekjur IAN FISIP UPR): Dalam rangka mendukung program pemerintah tentang merdeka belajar kampus merdeka, FISIP UPR melaksanakan kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Kalimantan Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah pada 2021. MoU dan Kerjasama diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masing-masing lembaga, dan juga dalam rangka mendukung program pemerintah tentang merdeka belajar kampus merdeka, melalui kerjasama ini diharapkan agar mahasiswa FISIP UPR dapat belajar di lembaga-lembaga kerjasamatersebut. Selanjutnya, program tersebut diteruskan dengan mengirimkan Mahasiswa FISIP UPR untuk magang dan praktek kerja di KPU Kalteng maupun KI Kalteng. Keinginan untuk tetap mengirimkan mahasiswa untuk magang dan praktek kerja padakedua instansi tersebut di semester selanjutnya merupakan cita-cita FISIP UPR untuk merealisasikan program MBKM dan tentunya meningkatkan skill serta kemampuan mahasiswa dalam memperkaya dan meningkatkan kapabilitas.

Antusiasisme dan optimisme dari jajaran FISIP UPR dalam penandatanganan kerjasama tersebut menyiratkan dukungan terhadap program pemerintah merdeka belajar-kampus merdeka.

Kekuatan dan Kelemahan Masing-Masing Perguruan Tinggi

Menurut Rita Rahmaniati (Ketua LP3MPT UMPR): Pihak Universitas Muhammadiyah Palangka Raya telah memiliki standar khusus yang telah diformulasi pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP). Jika dilihat secara kelembagaan, langkah-langkah penjaminan mutu telah dilakukan dan terbentuk serta dijalankan di bawah LP3MPT. Hal ini berarti baik perencanaan, kontrol, monitoring dan evaluasi untuk pengembangan mutu pendidikan perguruan tinggi di UMP bekerja langsung di bawah LP3MPT atau langsung dibawah komando Universitas. Unit pengembangan mutu tersebut berkoordinasidengan unit pengembangan mutu di fakultas. Tidak terdapat unit pengembagn mutu di jurusan/prodi sehingga setiap kegiatan yang berkenaan dengan mutu terkoordinir di fakultas.

Pelaksanaan pengembangan mutu Pendidikan di UMP telah didukung kerjasama dan koordinasi yang dilakukan secara regular oleh tim penjamin mutu pendidikan UMP. Pada tingkat fakultas, dilakukan rapat dan pertemuan rutin setiap bulan untuk membahas dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu. Hal ini merupakan salah satu kekuatan tim LP3MPT di UMP untuk menjamin terbukanya komunikasi dan Kerjasama yang koheren untuk mewujudkan penjaminan mutu di UMP.

Kekuatan UMP lainnya adalah dibentuknya tim khusus untuk mengelola kegiatan persiapan rekrreditasi sejak dua tahun sebelum masa akreditasi fakultas berakhir. Hal ini memberikan cukup kesempatan bagi LP3MPT maupun tim penjamin mutu di fakultas untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan rekrreditasi maupun mengevaluasi strategi penjaminan mutu selama ini yang telah dilakukan.

Menurut Erman P. Ranan (Ketua LP3MPT UNKRIP): strategi maupun model penjaminan mutu Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP) telah ada namun masih dalam tahapan konsepsi. UNKRIP juga belum mengirimkan mahasiswa untuk belajar di kampus lain agar dapat menerima ilmu maupun pembelajaran yang dibutuhkannya. Walaupun telah melakukan pertukaran dosen dengan FISIP UPR, namun kendala dalam pelaksanaan program

MBKM muncul, khususnya yang berkenaan dengan dukungan anggaran. Jika dilihat secara kelembagaan telah ada namun belum berfungsi secara optimal dan belum direalisasikan. Telah disebutkan bahwa kendala utama adalah anggaran yang belum dapat membantu terlaksananya program tersebut, namun kesediaan dosen untuk melakukan kegiatan pertukaran dengan Universitas Palangka Raya dianggap sebagai salah satu langkah rintisan yang dilakukan UNKRIP saat ini.

Menurut Sri Mujiarti Ulfah (Sekjur IAN FISIP UPR): Kekuatan FISIP UPR dalam pelaksanaan MBKM adalah dengan mengirimkan mahasiswa ke Universitas Jember untuk mengikuti perkuliahan sekaligus mengirimkan mahasiswa untuk magang ke Lembaga-lembaga yang potensial agar dapat memberi pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa. Ini berarti, FISIP UPR khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara (IAN) telah mempersiapkan mutu lulusan melalui program MBKM. IAN juga telah diaudit mutu internal oleh LP3MP Universitas Palangka Raya sehingga telah mendapatkan rekomendasi ataupun masukan dalam melakukan strategi peningkatan mutunya. Ini juga merupakan salah satu kekuatan FISIP UPR dalam melaksanakan program MBKM dan meningkatkan mutu lulusan maupun pengajar. Kendati demikian, terdapat hambatan seperti masih tergantungnya pendanaan kegiatan MBKM dengan fakultas sehingga kemandirian penuh belum dimiliki oleh jurusan. Sejatinya diharapkan dukungan maksimal moral sekaligus pendanaan untuk setiap kegiatan kerja, termasuk kegiatan pelaksanaan program MBKM.

Peluang dan Ancaman Masing-Masing Perguruan Tinggi

Menurut Rita Rahmaniati (Ketua LP3MPT UMPR): Peluang bagi mahasiswa belajar di universitas lain dan mengembangkan diri melalui mata kuliah di program studi lain memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa. Selain itu, peluang mendapatkan pembelajaran dari dosen baru di kampus lain dan dapat berkenalan dengan teman-teman baru juga dapat membuka pengetahuan dan memperluas pergaulan. Sedangkan tantangannya adalah penyusunan kurikulum yang telah ada dengan yang baru, kesiapan perangkat, dan sistem pendanaan dibebankan dengan sistem seperti apa. Selain itu kekuatiran juga muncul dari kesanggupan mahasiswa menyelesaikan studi mereka tepat waktu tanpa terganggu program MBKM. Tantangan melaksanakan program MBKM dan studi di kampus sendiri juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.

Menurut Erman P. Ranan (Ketua LP3MPT UNKRIP): Peluang yang dapat dilihat saat ini masih terbatas pada pertukaran dosen antar perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Pelaksanaan program MBKM masih terbatas di kampus UNKRIP. Tantangan yang dihadapi berupa kurangnya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program MBKM.

Menurut Sri Mujiarti Ulfah (Sekjur IAN FISIP UPR): Peluang yang dapat diambil dari program MBKM ini adalah dengan menjalin kerjasama yang lebih baik dengan stakeholder lainnya, seperti lembaga-lembaga pemerintah lainnya baik di tingkat provinsi maupun di kotamadya/kabupaten. Selain itu peluang untuk bersinergi dengan perguruan tinggi di dalam Kalimantan Tengah maupun di luar Kalimantan Tengah dapat dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas dosen maupun mahasiswa. Sedangkan ancaman yang harus diperhatikan adalah konversi SKS dengan kurikulum saat ini dan kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar ini di kampus lain. Persoalan lainnya adalah kurangnya dukungan dana sehingga kurangnya kemandirian fakultas dalam pelaksanaan program MBKM.

Strategi dan Model Yang Diterapkan Masing-Masing Perguruan Tinggi

Menurut Rita Rahmaniati (Ketua LP3MPT UMPR): UMP menekankan pada program-

program yang sifatnya pertukaran antara mahasiswa dan pengajar. Selain itu UMP berfokus pada peningkatan mutu pendidikan melalui kerjasama antar instansi yang dianggap menjebatani untuk dilakukannya kerjasama baik dalam bentuk seminar, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Strategi lainnya adalah dengan menjajaki program 3 menteri yaitu Sarjana untuk Kepala Desa dengan program RPL. Program peningkatan mutu pendidikan yang dirancang khusus untuk kepala desa menjadikan UMP sebagai salah satu destinasi pendidikan yang memfokuskan mencetak kepala desa berpendidikan dan mengenyam pendidikan tinggi.

Menurut Erman P. Ranan (Ketua LP3MPT UNKRIP): Karena implementasi program MBKM masih pada pertukaran dosen sehingga sulit untuk menetapkan strategi saat ini. Untuk dapat melaksanakan MBKM dibutuhkan asupan dana bagi kelancaran program dan untuk saat ini belum dapat direalisasikan UNKRIP.

Menurut Sri Mujiarti Ulfah (Sekjur IAN FISIP UPR): Selain mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program MBKM, FISIP UPR menekankan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pada kerjasama dengan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Kegiatan ini menysasar mahasiswa yang ingin meningkatkan pengetahuan maupun keterampilannya di wadah/lembaga yang lainnya. FISIP UPR menyediakan platform bagi mahasiswa agar dapat mengetahui keadaan dunia kerja melalui praktik lapangan ke instansi-instansi strategi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berhadapan dengan dunia nyata, keseharian kegiatan perkantoran, maupun interaksi sosial di Lembaga-lembaga tempat mereka praktik. Output yang di harapkan adalah peserta didik mampu melihat, membandingkan, menyandingkan dan menganalisis kesamaan antara teori yang dipelajari di kampus dengan kenyataan yang mereka hadapi dalam dunia kerja.

Rekomendasi Model Yang Dapat Disepakati Sebagai Standar Maksimum dan Standar Minimum

Menurut Rita Rahmaniati (Ketua LP3MPT UMPR): MoU antar perguruan tinggi dengan menyiapkan baik kurikulum yang ada. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain seperti industri, lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat untuk dapat menyiapkan tempat magang terbaik bagi mahasiswa agar menghasilkan lulusan yang siap kerja.

Menurut Erman P. Ranan (Ketua LP3MPT UNKRIP): Penguatan pada aspek kelembagaan maupun finansial agar dapat melaksanakan MBKM. Merubah *mindset* perguruan tinggi agar dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah yang baru ini. Menurut Sri Mujiarti Ulfah (Sekjur IAN FISIP UPR): Menambah MoU kerjasama penelitian, pertukaran mahasiswa maupun dosen dengan perguruan tinggi lain. Memiliki MoU kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, mencari peluang kerjasama dengan pihak swasta, dan mempersiapkan konversi nilai mata kuliah yang diambil mahasiswa di kampus lain.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Kompetisi mahasiswa harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan zaman. Perubahan sosial, budaya, terutama kebutuhan dunia kerja dengan pesatnya kemajuan teknologi memaksa mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas agar dapat diterima di dunia kerja. Karenanya perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan bagi mahasiswa yang diharapkan dapat menyediakan fasilitas pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran dari aspek pengetahuan maupun keterampilan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diformulasi Kemendikbud diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan dunia kerja saat ini. Program ini berusaha mewujudkan pembelajaran yang otonom dan fleksibel di perguruan tinggi sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Tujuan dari program MBKM adalah memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi. Program ini menasar peningkatan kompetensi lulusan yang baik dengan *softskill* maupun *hardskill* yang siap dengan kebutuhan pasar kerja.

Perguruan tinggi dituntut untuk menyiapkan lulusan yang dapat mejadi unggulan dan berjiwa pemimpin dan berkepribadian. Program ini juga diharapkan dapat memberikan *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel sekaligus memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan bakatnya.

Program utama MBKM adalah kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri, Lembaga pemerintah atau tempat kerja lainnya, mengikuti pertukaran mahasiswa, dan melakukan kegiatan kewirausahaan dapat dipilih oleh mahasiswa dalam program MBKM. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Sedangkan bagi dosen pengajar, kegiatan pengabdian kepada masyarakat didesa, mengajar di satuan pendidikan, melakukan penelitian, serta membuat studi/ proyek independent merupakan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan.

Program MBKM merupakan proses pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, dan kapasitas mahasiswa agar dapat memenuhi kebutuhan serta pengembangan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui dunia nyata. Pembelajaran dalam proses MBKM penting agar mahasiswa dapat menghadapi dinamika lapangan seperti pemenuhan persyaratan kemampuan/skill, *problem solving*, berbaur dalam interaksi sosial, berkolaborasi, memajemen diri, serta tuntutan kinerja dan target pekerjaan. Diharapkan melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat dan siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

Program MBKM yang dilaksanakan di tiga perguruan tinggi yang menjadi fokus penelitian ini telah dilaksanakan walau masih dalam tahapan awal. Praktik dan penerapan masih berupa pertukaran mahasiswa ke kampuslain, kegiatan magang, dan pertukaran pengajar antar kampus. Pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya telah melaksanakan indikator kinerja utama poin tiga dimana praktik dosen berkegiatan di luar kampus telah dilaksanakan. Jenis kegiatan lain seperti proyek kewirausahaan, pengabdian masyarakat maupun studi-studi independent belum dilaksanakan di ketiga perguruan tinggi tersebut. Beberapa kendala dalam pelaksanaan MBKM lebih kepada aspek pendanaan dan pengelolaan sehingga tidak adanya kemandirian dari fakultas dalam melaksanakan program ini.

Manajemen Pendidikan Tinggi

Manajemen pendidikan merupakan aktifitas memadukan sumber- sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya (Made Pidarta). Sedangkan Nanang Suhardan dan Nugraha Suharto dalam hal ini memakai istilah administrasi pendidikan yaitu ilmu yang membahas pendidikan dari sudut pandang kerjasama dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Walaupun kedua istilah ini berbeda, yang satu menyebut sebagai manajemen dan yang lain menyebut administrasi, pengertian keduanya hampir serupa. Keduanya berpusat pada interaksi antar manusia dalam iklim organisasi dan system dilingkungannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan mobilisasi segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (H.A Tilaar).

Manajemen pendidikan merupakan sebuah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun materi yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien (Djam'an Satori). Dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah sebuah proses pengelolaan atas kerjasama sekelompok individu yang tergabung di dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati bersama.

Manusia sebagai administrator ataupun pengelola tidak terlepas dari wadah melakukan kegiatan yang disebut organisasi (lembaga pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal). Sebuah organisasi tidak dapat terbentuk tanpa adanya aktor-aktor didalamnya, sinergi antar aktor beserta lingkungan sekitarnya akan membentuk sebuah sistem. Dapat dijelaskan bahwa manajemen pendidikan merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa : *man, money, materials, method, machines, market*, dan *minute* untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Jika dilihat dari ketersediaan *man* atau sumberdaya manusia yang dimiliki oleh ketiga perguruan tinggi UPR, UMP dan UNKRIP, dapat dilihat bahwa ketiganya memiliki cukup sumberdaya manusia dengan kapasitas dan kapabilitas yang baik. Pengorganisasian manusia yang dilakukan oleh ketiga perguruan tinggi tersebut adalah dengan menempatkan individu-individu sesuai keahliannya di dalam organisasi tersebut. Hal ini tentu saja didasari oleh pentingnya menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Selain sumberdaya manusia, selanjutnya aspek *money* merupakan aspek kedua yang juga penting dalam manajemen pendidikan tinggi. Pengelolaan pendanaan atau pembiayaan secara efisien merupakan aspek krusial agar tidak terjadi kebocoran atau pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan dalam lembaga pendidikan. *Materials* merujuk pada materi yang merupakan inti dari proses pembelajaran di perguruan tinggi. Bentuk materi yang dimaksud adalah kurikulum yang berisi panduan dalam transfer ilmu dari pengajar kepada siswa. Kurikulum harus berkesesuaian dengan kebutuhan pasar akan lulusan yang memiliki ilmu dan siap kerja. Aspek selanjutnya adalah *Method* dimana metode merupakan cara yang digunakan untuk mengajar oleh pengajar. Walaupun metode mengajar pengajar satu dan lainnya berbeda, namun metode ini dapat disesuaikan dengan kesiapan siswa yang diajar. Jika dilihat dari aspek metode ini, maka UPR dan UMP telah memiliki keunggulan karena telah merancang baik materi maupun metode pembelajaran dan telah mengaktualisasikan program MBKM sejak tahun ajaran 2020/2021.

Aspek kelima yang juga menjadi bahan pertimbangan manajemen pendidikan adalah *Machines* yang diterjemahkan dalam pengelolaan mesin sebagai peralatan penunjang yang digunakan sebaik-baiknya agar dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang membutuhkan peralatan yang di maksud. *Market* merupakan salah satu kunci yang menentukan lembaga pendidikan menjadi lembaga yang lebih besar atau sebaliknya. Pasar yang dimaksudkan adalah

masyarakat luas yang merupakan target atau sasaran yang dituju. Pasar ini adalah masyarakat yang berminat menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan/ perguruan tinggi. UPR dan UMP keduanya merupakan perguruan tinggi publik dan swasta terbesar di Kalimantan Tengah dengan prospek mahasiswa yang cukup banyak setiap tahunnya. Kedua Universitas ini tentu saja memiliki pasarnya sendiri dan keputusan untuk memilih salah satu diantaranya didasari pada keinginan pasar (pengguna) untuk mencapai pemenuhan pendidikan sesuai dengan capaian yang diinginkan. Aspek yang terakhir adalah *Minute* atau waktu, dimana aspek ini perlu dikelola dengan baik agar peserta didik dapat belajar dengan efisien karena waktu belajar di kampus sangat terbatas. Rancangan kurikulum dan ketersediaan waktu mahasiswa harus diselaraskan agar proses pendidikan siswa dapat efisien dan selesai tepat waktu.

Agenda MBKM sebagai salah satu sarana peningkatan mutu berbasis kinerja utama membutuhkan segenap elemen yang telah disebutkan diatas, baik dari sumberdaya manusia, pendanaan, rancangan material, cara penyelenggaraan pendidikan, hingga waktu yang mampu mendukung perbaikan mutu kearah yang lebih baik. Di dalam setiap institusi, peningkatan mutu merupakan agenda utama dan sebuah tugas yang paling penting demi eksistensi lembaga pendidikan tersebut. Mutu merupakan jaminan suatu lembaga pendidikan dalam meraih status di tengah-tengah persaingan di dunia pendidikan. Tanggung jawab lembaga pendidikan adalah memberdayakan segenap sivitas akademika terutama pengajar dan siswanya menjadi manusia yang cerdas, berilmu, berpengetahuan dan memiliki skill/keterampilan yang membuatnya dapat bersaing di dunia kerja.

Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi

Manajemen mutu pendidikan tinggi terkait erat dengan pengelolaan mutu pendidikan terpadu yang didukung kemampuan lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan potensinya. Tinggi dan rendahnya mutu pada perguruan tinggi dipengaruhi kurang optimalnya manajemen pendidikan, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran, serta sumber daya pengajar maupun pengelola pada aras administrasi. Sehingga, dapat dijabarkan bahwa manajemen mutu pendidikan tinggi adalah pengelolaan pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran dan kekakuan yang menghambatnya. Hal ini sejalan dengan program MBKM yang membuka kesempatan seluasnya bagi peserta didik untuk menerima pembelajaran dari kampus lain dan dari ilmu yang berbeda agar dapat lebih menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan maupun keterampilan.

Perguruan tinggi yang bermutu idealnya mampu menelurkan output lulusan yang dilengkapi intelektual, skill, dan berkarakter yang mampu bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. Pengelolaan mutu pendidikan yang dimaksud juga merujuk kinerja utama yang telah di sepakati sebelumnya. Kinerja merupakan penilaian atas hasil perilaku pegawai yang menyangkut baik buruknya seseorang melaksanakan tugas atau pekerjaan. Kinerja (*Performance*) merupakan manifestasi dari kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Oleh karenanya, perilaku yang menunjukkan hasil kerja pengajar atas pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dinilai dan disandingkan dengan outputnya.

Beberapa faktor yang dapat dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja adalah faktor kesempatan untuk berkinerja itu sendiri atau sering disebut sebagai *opportunity to perform*. Meskipun seseorang pegawai bersedia dan mampu untuk melakukan pekerjaan dengan baik namun jika faktor lingkungan tidak mendukung, maka kinerjanya pun akan terganggu. Faktor kesempatan untuk berkinerja diantaranya faktor-faktor kondisi kerjaseperti ketersediaan alat,

bahan, serta faktor lingkungan kerja menyangkut hubungan dengan rekan sekerja, aturan dan prosedur kerja, kepemimpinan atasan, waktu dan informasi yang memadai. Faktor yang terkait dengan kinerja adalah faktor lingkungan kerja. Ketika lingkungan kerja mendukung maka kondisi yang merintangai pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan waktu, fasilitas, pendanaan, teknologi, peralatan, dan faktor manusia juga akan dapat diatasi. Maka dapat disimpulkan kinerja dosen sebagai pengajaryang melakukan tri dharma perguruan tinggi akan meningkat jika di dukungkompetensi, motif untuk berprestasi dan kondisi lingkungan kerja yang baikpula.

Selain kinerja pengajar, performa administrasi juga dibutuhkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi. Jajaran pada jenjang administrasi perlu bekerja sesuai prosedur, kewenangan dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas administrasi tersebut juga dibutuhkan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Proses ini merupakan kontrol terhadap setiap target awal maupun capaian dalam meningkatkan mutu. Seringkali persoalan yang muncul, adalah terjadinya benturan antara tim administrasi dan tim keuangan yang menyebabkan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang tidakdapat dilaksanakan karena kendala pendanaan. Kedua tim tersebut tidak bersinergi satu sama lain dan memberikan sinyal berbeda kepada fakultas ataupun jurusan. Ketidaksamaan langkah oleh pihak administrasi/perencanaan dengan pihak keuangan/pendanaan disebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri dalam memformulasi kegiatan. Pihak administrasi tidak berkoordinasi dengan pihak keuangan sehingga ketika beberapa kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam rangka meingkatkanmutu pendidikan seringkali terkendala anggaran. Demikian pula sebaliknya, pihak keuangan merancang anggaran tanpa sinkronisasi dengan pihak perencanaan, menyebabkan seringkali kurangnya alokasi pendanaan untuk beberapa rancangan kegiatan peningkatan mutu pendidikan di aras fakultas maupun jurusan/prodi.

Pengelolaan mutu Pendidikan juga memerlukan monitoring dan evaluasi secara kontinu yang dapat dilakukan oleh lembaga internal maupuneksternal perguruan tinggi. Sesuai yang termaktub dalam UU Dikti Pasal 53dan Pasal 52 ayat (4), SPM Dikti terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) (Ristekdikti,2010: 8; 2016:7). Kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikantinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi, melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Perlu dibentuk tim penjamin Mutu Internal yang kegiatannya di rancang, dikendalikan serta bersifat independent oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Didalam penjaminan mutu internal ini terdapat kegiatan sistemik yang bertujuan meningkatkan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Proses audit yang dilakukan oleh lembaga penjamin mutu internal kepada fakultas-fakultas yang ada di perguruan tinggi memberikan *guidance* atau tuntunan untuk mencapai target mutu yang telahdi rancang. Pada universitas Palangkaraya, proses audit mutu internal berada di bawah pengelolaan LP3M dan FISIP UPR juga telah di audit olehtim penjamin mutu internal dalam pengelolaan mutu pendidikan di lingkungan FISIP. Tentunya proses audit tersebut memberikan masukan maupun kritik terhadap kinerja maupun output yang dicapai. Melalui proses audit tersebut, diharapkan perbaikan yang berkelanjutan tetap dilakukan fakultas/jurusan.

Selain peningkatan mutu dari pengajar, tenaga administrasi, pengelolaan keuangan dan pembentukan lembaga audit internal, salah satu aspek yang juga penting adalah aspek kepemimpinan di aras universitas maupun fakultas. Dibutuhkan ketegasan dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan mutu, seperti menempatkan orang yang tepat pada tim yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Mendorong sinergi terbentuk antar tim

perencanaan dan tim keuangan agar seirama dan harmonis dalam mewujudkan kegiatan dan pencapaian target dengan ketersediaan anggaran yang cukup agar kegiatan dapat berjalan. Persoalan yang seringkali muncul adalah tidak tercapainya kerjasama antartim dikarenakan kepemimpinan yang belum berkomitmen terhadap capaian target mutu pendidikan yang telah dirancang. Ini menyebabkan bentrok antara tim perencanaan dengan anggaran selalu muncul. Oleh karenanya dibutuhkan sikap kepemimpinan yang tegas dalam membimbing arah mutu pendidikan pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi di tingkat fakultas dan jurusan/prodi, Beberapa masukan untuk pengembangan strategi pengembangan mutu diperoleh melalui *brainstorming* dengan universitas lain sebagai masukan yang dapat menjadibahkan pertimbangan strategi dan model pengembangan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah masih dibutuhkannya dorongan untuk pelaksanaan MBKM sebagai salah satu indikator peningkatan mutu Pendidikan tinggi. Implementasi MBKM di tiga perguruan tinggi yang dibahas dalam penelitian ini hanya mencakup 2 poin dari 8 poin Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dan dosen berkegiatan di luar kampus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan beberapa program serta kurangnya sinkronisasi antarbagian administrasi dan keuangan sehingga tidak tercapainya target ataupun sasaran yang telah dirancang. Persoalan kurangnya komitmen dan *leadership* dari *decision maker* membuat program-program seperti dijalankan setengah-setengah dan tidak tuntas. Kendati demikian, ketiga perguruan tinggi yaitu UPR, UMP, dan UNKRIP memiliki potensi sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas yang baik, sehingga idealnya SDM tersebut dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan MBKM dalam rangka perbaikan mutu pendidikan perguruan tinggi.

Peluang yang masih harus diambil oleh perguruan tinggi di Kalimantan Tengah adalah kerjasama dengan pihak industri, maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan lulusan yang mumpuni. Kerjasama dengan mitra internasional juga merupakan peluang yang saat ini harus dijajaki karena Kalimantan Tengah memiliki potensi alam, hutan maupun jasa lingkungan yang saat ini banyak diminati dunia internasional. Selaras dengan itu, ancaman dalam pelaksanaan perbaikan mutu pendidikan tentu saja akan muncul dan sejatinya dapat dikelola seminimal mungkin agar tidak berdampak pada kegiatan pendidikan di perguruan tinggi. Kendala yang di hadapi jurusan/program studi dan mahasiswa dalam program MBKM adalah menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kurikulum MBKM. Selain itu masih sedikitnya mitra dalam kegiatan studi independen dan magang membuat program MBKM sulit terealisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Palangka Raya yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian dasar inovatif tahun 2022. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan rekomendasi kepada perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Aspranawa, A. D. P. (2015). Memahami Quality Assurance Menjadikan Budaya Mutu Perguruan Tinggi. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 111–134.

- <https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.111-134>
- Bennett, D. P. (2021). *CRISIS MANAGEMENT AT AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION DURING THE*.
- Buyung, S. (2016). IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU (Studi Transformatif Pada Perguruan Tinggi). *Jurnal Penelitian*, 10(2), 231–252.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, K. (2021). *Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen 2021* (p. 7275630). p. 7275630. Jakarta: Dirjen DiktiKemendikbud.
- Gautam, D. K., & Gautam, P. K. (2021). Transition to online higher education during COVID-19 pandemic: turmoil and way forward to developing country of South Asia-Nepal. *Journal of Research in Innovative Teaching & Learning*, 14(1), 93–111. <https://doi.org/10.1108/jrit-10-2020-0051>
- Jalaludin, A. (2017). Evaluasi Kesenjangan Kinerja Dosen Untuk Meningkatkan Manajemen Mutu Perguruan Tinggi. *Business Management Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.30813/bmj.v9i2.751>
- Karakose, T. (2021). The impact of the COVID-19 epidemic on higher education: Opportunities and implications for policy and practice. *Educational Process: International Journal*, 10(1), 7–12. <https://doi.org/10.22521/EDUPIJ.2021.101.1>
- Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook* (Third Edit). Arizona United States of America: SAGE Publications.
- Muslihk. (2020). Landasan Filosofis dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. *Jurnal Sytax Transformation*, 1(3), 40–46.
- Muslimat, Ade, et. al. (2021). Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar. In D. Sunarsi (Ed.), *kekerasan terhadap anak "BOM Waktu" masa depan* (1sted.). Serang - Banten: Bintang Sembilan Visitama.
- Nesterchuk, O. A., Grishin, O. E., & Chepurnaya, A. M. (2020). Digitalization as the “new normal” of higher education. *Journal of Physics: Conference Series*, 1691(1), 1–6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1691/1/012068>
- Pendidikan Tinggi, D. J. (2020). *Buku Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi COVID-19*. Retrieved from www.dikti.kemdikbud.go.id
- Pidarta, M (1998), manajemen Pendidikan dalam Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol 5. No.2. Universitas Negeri Malang.
- Ramírez-Hurtado, J. M., Hernández-Díaz, A. G., López-Sánchez, A. D., & Pérez- León, V. E. (2021). Measuring online teaching service quality in higher education in the covid-19 environment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(5), 1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052403>
- Saha, T., Das, P. P., & Singh, R. (2021). Challenges in higher education during and after COVID-19 pandemic in India. *Journal of Physics: Conference Series*, 1797(1), 1–6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1797/1/012065>
- Satori, Djam'an. (2016) *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Scott, C. (2021). Managing higher education for a changing regulatory environment. *Public Administration and Policy*, 24(1), 7–20. <https://doi.org/10.1108/PAP-10-2020-0045>
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157.
- Subijanto, et. al. (2020). *Penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi pada masa pandemi covid 19*. Jakarta.
- Suhardan, D., & Suharto, N. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tinggi, D. J. P. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka* (Satu). <https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte>

- Toader, T., Safta, M., Titiris, C., & Firtescu, B. (2021). Effects of Digitalisation on Higher Education in a Sustainable Development Framework — Online Learning Challenges during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, *13*, 1–25.
- Uswatiyah, W., Argaeni, N., Masrurah, M., Suherman, D., & Berlian, U. C. (2021). Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Serta Pendidikan Tinggi. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, *3*(1), 28–40. <https://doi.org/10.47467/jdi.v3i1.299>
- Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfah, S. (2019). JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(2), 22–33.